

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di Indonesia mengalami keadaan yang pasang surut dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut disebabkan karena adanya persaingan ketat di era globalisasi dan pasar bebas dikancah internasional salah satunya dengan mulai berlakunya era perdagangan bebas di lingkungan *ASEAN* bagi seluruh negara berkembang anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation*, dimana batas suatu negara akan makin kabur, maka diperlukan suatu keselarasan dalam penerapan standar aturan yang mengacu pada praktek internasional. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa praktek bisnis di Indonesia memiliki tempat tersendiri dalam perkembangan bisnis di Dunia.

Dengan gambaran perkembangan diatas, isu *corporate governance* yang tadinya hanya bersifat marginal kini telah menjadi isu sentral, kebutuhan *good governance* timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antar principal dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang *corporate governance*.

Corporate governance merupakan salah satu cara perusahaan agar dapat melakukan tata kelola yang baik dengan cara melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perilaku para eksekutif perusahaan demi melindungi

kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu (Bambang, 2013). Indonesia mulai menerapkan prinsip *good corporate governance* sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002; dalam Sutedi, 2012).

Menurut Sutedi (2012:1) *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya serta berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

OECD dalam Siswanto dan Aldridge (2005:2) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian dan pengawasan pada suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin tanpa merugikan *stakeholder*-nya. Setiap badan usaha memiliki pihak-pihak yang berkepentingan terhadap badan usaha tersebut, antara lain pihak manajer, pemegang saham, karyawan, dan *stakeholder* lainnya. *Corporate governance* membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen perusahaan (dewan komisaris, dewan

direksi, dan pemegang saham) untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Corporate governance merupakan suatu ruang lingkup yang mencakup kepercayaan, etika, nilai moral, dan keyakinan sebagai suatu usaha yang sinergik yang terdiri dari seluruh konstituen masyarakat. Definisi integral mengarah ke corporate governance sebagai sebuah sistem yang menjamin bahwa perusahaan dapat berkembang pesat ke arah strategik terbaik untuk seluruh stakeholders (Crowther dan Aras, 2009).

Corporate governance merupakan bagian penting dalam pengelolaan perusahaan yang memiliki prinsip *fairness, transparency, accountability*, dan *responsibility* sehingga perusahaan yang bertata kelola dengan baik semestinya akan dapat mengurangi masalah agensi (Ujiyanto dan Pramuka, 2007; dalam Lindawati, 2010). Terdapat dua mekanisme untuk menciptakan *corporate governance* yang baik yaitu mekanisme internal dan eksternal (Ujunwa, 2012; dalam Ika dan Wahyu, 2013). Mekanisme internal melibatkan pemilik dan pengelola perusahaan seperti Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Konsentrasi Kepemilikan. Mekanisme eksternal melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti penggunaan utang dari para pemberi pinjaman yang tertuang dalam *leverage* perusahaan (Puspitasari dan Ernawati, 2010).

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan bagian penting dalam mensejajarkan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Mekanisme *Corporate Governance* yang baik dapat meminimumkan konflik

agensi, dengan demikian akan mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Lindawati (2010) mengatakan bahwa kinerja keuangan memberikan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui kondisi baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. Informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan prestasi kerja dalam periode tertentu tercermin dalam laporan keuangan perusahaan.

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan perbankan tidak berbeda dengan pengukuran kinerja perusahaan pada umumnya. Menurut Minan (2008:16) kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Dalam UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank.

Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan kesehatan bank adalah ROA (*return on assets*). ROA menurut Minan (2008:19) kemampuan manajemen bank untuk mengubah *asset* menjadi *earnings*. Kemampuan tersebut diwujudkan dengan mengelola bank secara

efisien dengan memaksimalkan *asset* bank yang tersedia. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat.

Menurut Baidarie (2013:12), kinerja perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangannya tetapi juga ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *good corporate governance*, FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) bekerjasama dengan Asian Development Bank dan Pricewaterhouse coopers telah mengembangkan suatu penilaian mandiri (*self assesment*) sebagai alat untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia menilai pelaksanaannya *Good Corporate Governance* nya.

Khusus bank, penilaian mandiri (*self assesment*) GCG berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum, maka setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia diharuskan melakukan *self assesment* terhadap pelaksanaan GCG minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan hasil *self assesment* tersebut merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan GCG. Penilaian mandiri menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 meliputi: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi; 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; 4. Penanganan benturan kepentingan; 5. Penerapan fungsi kepatuhan bank; 6. Penerapan fungsi audit intern; 7. Penerapan fungsi audit ekstern; 8. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar; 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; 11. Rencana strategis bank.

Menurut Johansyah (2011) pelaksanaan self assesment GCG bank umum yang diawasi oleh Pengawas Bank Indonesia akan menjadi bagian penentu tingkat kesehatan/kinerja bank. Disamping itu Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk menyampaikan laporan GCG setiap tahun dan masyarakat dapat mengaksesnya melalui website bank. Laporan GCG tersebut meliputi fraud yang terjadi di bank, benturan kepentingan, remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi, pengaduan nasabah dan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan bank secara transparan. Informasi laporan yang dapat diakses oleh masyarakat tersebut dapat memberikan informasi yang akurat untuk masyarakat dapat menyimpan dananya di bank.

Penelitian mengenai hubungan GCG dengan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan diantaranya Dewayanto (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan penerapan corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan nasional yang terdaftar pada BEI. Penelitian Purnamasari (2012) menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Ristifani (2009) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akan tetapi, penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan GCG yang diukur dengan nilai komposit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2017”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan, maka peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance* yang diproksikan dengan empat proksi yaitu: ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, dan ukuran perusahaan.
3. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mengacu kepada uraian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pertanyaan:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan?

2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh komisaris independen perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini merupakan salah satu langkah untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan.

2. Bagi Akademisi.

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan mengenai praktik *Corporate Governance* yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan serta referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama.

3. Bagi Praktisi.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini dijabarkan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran umum permasalahan dalam akuisisi yang diangkat dari penelitian ini. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan dasar teori dan analisis. dalam bab ini dikemukakan pengertian Akuisisi, Klasifikasi

Akuisisi, Motif Akuisisi, Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Akuisisi, Langkah-Langkah Akuisisi, Alasan-Alasan perusahaan melakukan Akuisisi, Analisis kinerja keuangan dalam Akuisisi serta beberapa penelitian sebelumnya yang akan mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran populasi dan sampel yang digunakan dalam studi empiris, pengidentifikasian variabel-variabel penelitian dan penjelasan mengenai cara pengukuran variabel-variabel tersebut selain itu juga dikemukakan teknik pemilihan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan isi pokok dari keseluruhan penelitian ini. Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis hasil pengolahan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran.